

**EVALUASI PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
MELALUI PELAKSANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR PEDESAAN (PPIP) DI KABUPATEN
PASAMAN BARAT**

SKRIPSI

*Diajukan kepada Tim Penguji Skripsi Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Jurusan Ilmu Administrasi Negara sebagai salah satu persyaratan Guna
memperoleh Gelar Sarjana Administrasi Publik*



**Oleh
EZI MARNI**

NIM/BP. 1101739/2011

**PROGRAM STUDI
ILMU ADMINISTRASI NEGARA**

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2015**

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Judul : Evaluasi Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PPIP) di Kabupaten Pasaman Barat

Nama : Ezi Marni

Nim/TM : 1101739/2011

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

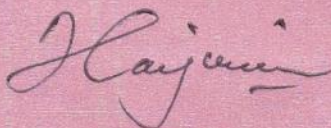
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara

Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 26 Maret 2015

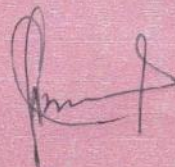
Disetujui Oleh:

Pembimbing I



Drs. Karjuni Dt. Maani, M.Si
NIP.19630617 198903 1 003

Pembimbing II



Dra.Hj. Fitri Eriyanti, M.Pd, Ph.D
NIP. 19640208 199003 2 001

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

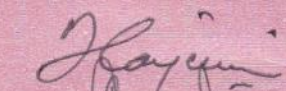
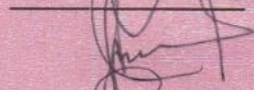
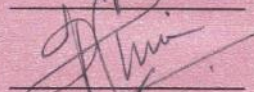
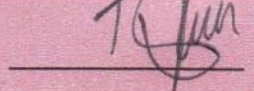
Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi
Program Studi Ilmu Administrasi Negara Jurusan Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang
Pada Hari Kamis, Tanggal 26 Maret 2015 Pukul 08.00-10.00 Wib

Evaluasi Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PIIP) Di Kabupaten Pasaman Barat

Nama : Ezi Marni
Nim/TM : 1101739/2011
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 26 Maret 2015

Tim Penguji

	Nama	Tanda Tangan
Ketua	: Drs. Karjuni Dt. Maani, M.Si	
Sekretaris	: Dra. Hj. Fitri Eriyanti, M.Pd. Ph.D	
Anggota	: Prof. Dasman Lanin, M.Pd. Ph.D	
Anggota	: Drs. M. Fachri Adnan, M.Si. Ph.D	
Anggota	: Drs. Syamsir, M.Si. Ph.D	

**Mengesahkan:
Dekan FIS UNP**


Prof. Dr. Syafri Anwar, M.Pd
NIP. 19621001 198903 1 002

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ezi Marni
NIM/TM : 1101739/2011
Tempat/Tanggal Lahir : Simpang Empat, 8 Maret 1993

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul “Evaluasi Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan di Kabupaten Pasaman Barat” adalah benar merupakan karya asli saya, kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam skripsi ini sepenuhnya merupakan tanggungjawab saya sebagai penulisnya.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 26 Maret 2015

Yang Membuat Pernyataan

EZI MARNI

1101739 / 2011

ABSTRAK

EZI MARNI (1101739/2011) Evaluasi Program Pemberdayaan Masyarakat melalui pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PPIP) di Kabupaten Pasaman Barat

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya masalah yang ditemukan dalam pelaksanaan program pembangunan infrastruktur pedesaan (PPIP) di Kabupaten Pasaman Barat, seperti Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) selaku pihak pengelola atau pelaksana kegiatan yang tidak transparan dalam melaksanakan pekerjaan, masih banyaknya masyarakat yang tidak peduli dan tidak mendukung kegiatan pemberdayaan masyarakat, Tim pelaksana kabupaten yang kurang mensosialisasikan program kepada OMS dan Masyarakat serta kurang maksimal dalam mengadakan monitoring dan evaluasi sejak dari awal sampai akhir pelaksanaan kegiatan pembangunan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PPIP) dan mengetahui dampak pelaksanaan PPIP melalui pembangunan infrastruktur jalan terhadap kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Pasaman Barat.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Pemilihan informan dilakukan dengan menggunakan teknik purposive sampling. Jenis dan sumber data adalah data primer data sekunder. Data primer dalam penelitian ini adalah data tentang pelaksanaan PPIP dan dampak pelaksanaan PPIP terhadap masyarakat. Sementara itu, data sekunder dalam penelitian ini adalah data mengenai letak geografis wilayah, pembagian wilayah dan jumlah penduduk. Adapun metode yang digunakan dalam analisis data adalah analisis data deskriptif melalui tahap reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program pembangunan infrastruktur pedesaan (PPIP) reguler I dan II yang berjumlah sebanyak 35 buah lokasi pada tahun 2013 di Kabupaten Pasaman Barat secara umum semuanya sudah selesai terlaksana. Selain itu, hasil pelaksanaan PPIP terutama yang berupa jalan beton sangat bermanfaat bagi kelancaran akses transportasi masyarakat dan memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat. Terlaksananya PPIP di Kabupaten Pasaman Barat juga tidak terlepas dari dukungan dan keterlibatan berbagai pihak mulai dari Bupati, Camat, Walinagari, Kepala Jorong, Tim Pelaksana PPIP, Satuan Kerja PPIP, fasilitator, OMS dan masyarakat di masing-masing jorong sasaran penerima PPIP.

KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **"Evaluasi Program Pemberdayaan Masyarakat melalui Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan di Kabupaten Pasaman Barat"**.

Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) pada Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Selama proses penulisan skripsi ini, penulis mendapatkan banyak masukan berupa motivasi, bantuan, bimbingan, saran dan arahan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Syafri Anwar, M.Pd selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
2. Bapak Drs. Syamsir, M.Si, Ph.D selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara dan Ibu Dra. Jumiati, M.Si selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara.
3. Bapak Drs. Karjuni Dt Maani, M.Si sebagai dosen Pembimbing I dan Ibu Dra. Hj Fitri Eriyanti, M.Pd, Ph.D sebagai dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, petunjuk, arahan, nasehat serta saran kepada penulis selama menyelesaikan skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
4. Bapak Prof. Dasman Lanin, M.Pd, Ph.D, Bapak Drs. M. Fachri Adnan, M.Si, Ph.D dan Bapak Drs. Syamsir, M.Si, Ph.D selaku Tim Penguji yang telah memberikan masukan berupa saran dan arahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Ilmu Administrasi Negara yang telah membimbing penulis selama belajar di UNP.

6. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pasaman Barat, Bapak Nasril selaku Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pasaman Barat, Ibu Henny Ferniza selaku Ketua Satuan Kerja PPIP dan Bapak Rudianto selaku anggota Tim Pelaksana PPIP Kabupaten Pasaman Barat.
7. Teristimewa untuk kedua orangtuaku dan seluruh keluarga yang telah memberikan doa, dukungan, semangat untuk terus menjadi anak yang berprestasi. Dengan doa, dukungan serta semangat itulah penulis dapat menyelesaikan perkuliahan ini.

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya membangun dari berbagai pihak. Akhir kata semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca. Amiiin.

Padang, 26 Maret 2015

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi, Batasan dan Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	12
 BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Kajian Teoritis.....	13
B. Kerangka Konseptual	37
 BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	39
B. Lokasi Penelitian	39
C. Informan Penelitian	40
D. Jenis dan Sumber Data	41
E. Teknik dan Alat Pengumpulan Data	43
F. Uji Keabsahan Data.....	45
G. Teknik Analisis Data	46
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Temuan Umum.....	48
B. Temuan Khusus	50
C. Pembahasan	90
 BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	111
B. Saran	112
 DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Indikator Pengukuran Kinerja PPIP	35
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur, Mata Pencaharian Dan Pendidikan.....	49
Tabel 4.2 Jumlah Lokasi PPIP Tahun Anggaran 2013 di Kabupaten Pasaman Barat	51

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.2 Kerangka Konseptual	38
--------------------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

1. Pedoman wawancara.....
2. Dokumentasi wawancara
3. Dokumentasi PPIP berupa jalan rabat beton.....
4. Surat izin penelitian
5. Surat keterangan selesai penelitian

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada hakikatnya, pembangunan merupakan upaya perbaikan yang dilakukan secara terencana dari suatu situasi ke situasi yang dianggap lebih baik. Di samping itu, pembangunan juga dapat diartikan dengan *development signifies change from something thought to be more diserable* yang berarti adanya proses perubahan menuju kehidupan yang lebih baik. Pembangunan merupakan suatu proses untuk mensejahterakan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah bersama rakyat secara berkesinambungan(Syaukani, 2004: 1&45). Dalam konteks otonomi daerah, pembangunan dilaksanakan untuk pemeratakan dan menyebarluaskan pembangunan di daerah dalam rangka memperkecil perbedaan tingkat pertumbuhan antar daerah yang satu dengan daerah lain serta memadukan seluruh kegiatan pembangunan di daerah dalam rangka menunjang keberhasilan pembangunan secara keseluruhan(Syaukani, 2004: 71). Peluang pemerintah daerah untuk membangun daerahnya di era otonomi ini cukup tinggi. Setidaknya, dengan potensi-potensi penting di daerah, seperti tersedianya sumber daya alam yang melimpah dan tenaga kerja murah, investasi ekonomi di daerah dapat dipacu secara proporsional. Otonomi daerah dan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah adalah tuntutan pemerintah daerah dan masyarakat di Indonesia. Diberlakukannya UU No 22 tahun 1999 yang kemudian diubah dengan UU No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan anantara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

yang direspon positif oleh semua masyarakat di daerah. Karenanya setiap pemerintah daerah menanggapi dengan melahirkan sejumlah program pembangunan daerahnya masing-masing, mulai dari visi-misi, tujuan dan sasaran, sifat dan metode, asas dan modal dasar, partisipasi masyarakat, hingga pengawasan pembangunan akan *memback up* penataan pembangunan di daerah (Syaukani, 2004: 61)

Masalah yang paling sering ditemui dalam hubungan pembangunan antara pusat dan daerah adalah masalah ketidakadilan distribusi pendapatan dan hasil-hasil pembangunan atau yang lebih tepat dikatakan perimbangan keuangan pusat dan daerah, maka yang terjadi adalah kesenjangan mencolok antara pusat dan daerah tidak dapat dihindarkan lagi. Hampir 80 persen uang negara beredar di pusat, berbagai infrastruktur yang lengkap banyak tersebar di pusat kota. Disadari atau tidak, keadaan ini menimbulkan kesenjangan antara pusat dan daerah sehingga daerah mengalami kesulitan dalam mengejar ketertinggalan pembangunan daerahnya. Pendapat Adam Smith dapat dijadikan sebagai bahan renungan bahwa jika rasa keadilan dalam perimbangan keuangan pusat dan daerah tidak dapat diwujudkan, berarti tonggak Indonesia sebagai negara yang berdaulat akan goyah dan segera runtuh. Untuk mencegahnya, dalam hubungan antara pusat dan daerah maka yang paling penting adalah adanya keadilan dalam masalah dana perimbangan. Rasa keadilan dalam perimbangan keuangan mempunyai peran strategis dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat daerah dan sekaligus menopang solidaritas masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Peningkatan rasa keadilan dalam perimbangan keuangan antara pusat dan daerah

akan mengakibatkan terjadinya pembangunan ekonomi daerah yang kuat sebagai pondasi perekonomian nasional (Syaukani, 2004: 6-14).

Pemerintah daerah dapat membuat perencanaan-perencanaan strategis karena adanya keadilan penerimaan dan perimbangan. Terjadinya pemerataan pembangunan antar daerah sebagai akibat adanya keadilan dalam dana perimbangan antar daerah yang diterima oleh daerah maka akan mendorong tumbuhnya sektor riil di daerah. Tetapi masalah mendasar yang terjadi dalam melaksanakan pembangunan di daerah adalah keterbatasan infrastruktur dasar dan rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) untuk memanfaatkan potensi dan sumber daya alam yang mereka miliki. Paling tidak, hal yang mendasar yang harus diselesaikan oleh masyarakat daerah adalah berkaitan dengan banyaknya jumlah penduduk miskin di daerah yang kemudian diistilahkan dengan masyarakat yang tertinggal. Pembangunan daerah ditujukan pada peningkatan kemampuan masyarakat setempat dalam mendayagunakan sumber daya yang ada di daerahnya yang pada akhirnya pembangunan tersebut akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Namun, usaha pembangunan suatu daerah membutuhkan suatu tekanan yang berbeda-beda antar daerah pada level tingkat pemerintahan: Propinsi, Kabupaten, dan Pedesaan. Masalah pertumbuhan ekonomi dan usaha-usaha penarikan investasi misalnya, sebenarnya lebih merupakan kebutuhan pembangunan daerah Propinsi. Sedangkan untuk daerah Kabupaten dan daerah Pedesaan, masalah yang nampaknya lebih menuntut prioritas untuk dipenuhi adalah upaya-upaya peningkatan kemampuan aparat

pemerintah (dalam melaksanakan suatu program) dan peningkatan perekonomian rakyat (Syaukani, 2004: 14-17)

Program-program pembangunan dihadirkan secara terus menerus sejak Indonesia lahir, sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program-program pembangunan ini ada yang bersifat sesaat, ada pula yang berorientasi jangka panjang. Era reformasi sangat banyak program pembangunan masyarakat khususnya yang muncul di kawasan pedesaan salah satunya adalah melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) yang mulai bergerak pada tahun 2007, program ini bergerak dari masyarakat dan disusun berdasarkan kondisi kehidupan masyarakat setempat. Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri tahun 2007 dimulai dengan Program Pengembangan Kecamatan (PPK), sebagai dasar pengembangan pemberdayaan masyarakat di pedesaan beserta program pendukungnya seperti PNPM Generasi, Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) sebagai dasar pengembangan pemberdayaan masyarakat di perkotaan dan percepatan pembangunan daerah tertinggal. PNPM Mandiri diperkuat dengan berbagai program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh berbagai departemen/sektor dan pemerintah daerah. Pelaksanaan PNPM Mandiri pada tahun 2008 juga diprioritaskan pada desa-desa tertinggal. Pengintegrasian berbagai program pemberdayaan masyarakat ke dalam kerangka kebijakan PNPM Mandiri. Cakupan pembangunan diharapkan dapat diperluas hingga daerah-daerah terpencil dan terisolir, pelaksanaan program sampai ke daerah-daerah pelosok membutuhkan keseriusan bagi pelaksana program dan pihak-pihak yang terkait

serta melibatkan partisipasi masyarakat. PNPM Pedesaan merupakan program pemberdayaan masyarakat terbesar di Indonesia. PNPM Pedesaan menyediakan dana Bantuan secara Langsung bagi Masyarakat (BLM) antara 250 juta sampai 3 milyar perkecamatan, tergantung dari jumlah penduduk dan kondisi wilayah. Program ini mengusung sistem pembangunan *Bottom Up Planning*, seluruh kegiatan diusulkan langsung dan dilaksanakan oleh masyarakat. Masyarakat desa sama-sama terlibat dalam proses perencanaan partisipatif dan pengambilan keputusan penggunaan dana BLM, hal ini dilakukan atas dasar kebutuhan pembangunan dan prioritas yang ditentukan bersama dalam forum musyawarah. Masyarakat diajak terlibat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemeliharaan, pengelolaan dan pemantauannya (Pahmi SY, 2010:88-93)

Sehingga dengan demikian untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat pedesaan, pemerintah pusat meluncurkan Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PPIP) dari APBN sebesar RP 250 juta per desa/nagari. Program tersebut dilaksanakan untuk memberdayakan masyarakat dengan menyelenggarakan program percepatan dan perluasan pembangunan infrastruktur di pedesaan sebagai upaya untuk mewujudkan peningkatan akses masyarakat miskin, hampir miskin, dan kaum perempuan, termasuk kaum minoritas ke pelayanan infrastruktur perdesaan, dengan berbasis pada pendekatan pemberdayaan masyarakat dan peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik. Sehubungan dengan hal tersebut Kabupaten Pasaman Barat sebagai salah satu kabupaten yang ada di Indonesia juga ikut serta dalam melaksanakan PPIP. Pada tahun anggaran 2013 Kabupaten Pasaman Barat memperoleh Program

Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Reguler I dan II sebanyak 35 buah yang berjumlah senilai Rp8,7 miliar lebih. Program itu berada di 35 Jorong di kabupaten setempat. Pelaksanaannya harus dijalankan sesuai aturan, sejalan dengan program pemerintah daerah menuju peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ada yang digunakan untuk pembangunan jalan, jembatan, sarana air bersih dan lainnya. Program PPIP tersebut merupakan program yang berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melalui pembangunan akses jalan dan sarana lainnya dalam rangka memberantas kemiskinan.

Dengan program ini, akan terlihat jelas peluang untuk mengendalikan masyarakat lepas dari ketertinggalan dan kemiskinan pada suatu kejurongan, kenagarian, maupun di kecamatan. Sementara itu sasaran dari PPIP tersebut adalah berupa pembangunan jalan, jembatan dan sarana air bersih. Dengan harapan masyarakat betul-betul dapat merasakan manfaat dari program PPIP ini dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat luas. Pelaksanaan kegiatan PPIP merupakan salah satu upaya untuk mensejahterakan masyarakat dari berbagai kegiatan pembangunan yang dilakukan di tengah masyarakat kabupaten setempat, baik dari sisi pembangunan infrastruktur jalan maupun yang menyangkut dengan kemudahan akses masyarakat serta untuk kebutuhan pertanian dan perkebunan. Pasalnya dengan dibangunnya suatu jalan tersebut jelas akan memberikan kemudahan akses ke sarana kesehatan, dan sarana pendidikan serta memudahkan petani membawa hasil pertanian selain itu juga sebagai sarana penghubung antar masyarakat jorong yang dapat memperlancar kegiatan perekonomian. Jika

dibandingkan dengan kondisi sebelumnya, yang mana karena keterbatasan akses jalan dan sarana yang memadai membuat interaksi antar masyarakat jorong juga sulit terjadi lantaran akses dan sarana penghubung kurang memadai untuk melakukan kegiatan perekonomian tersebut, selain itu petani juga lebih kesulitan dan harus mengeluarkan biaya/ongkos untuk membawa hasil pertanian maupun perkebunan.

Berdasarkan berita *online* yang dimuat di situs Padang Ekspres pada hari Kamis, 12/12/2013 menjelaskan bahwa Pembangunan jalan usaha tani melalui Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PPIP) di Jorong Girimaju, Nagari Koto Baru, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat diduga bermasalah, dalam Pelaksanaan PPIP itu banyak terjadi masalah, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas bangunan serta penggunaan dananya. Adapun jenis pekerjaan yang dilakukan adalah pembangunan jalan usaha tani berupa rabat beton yaitu jalan yang terbuat dari material semen sebagai bahan pengikat, pasir sebagai bahan pengisi dan batu sebagai bahan penguat serta air sebagai bahan pencampur antara ke 3 bahan pokok tersebut yang diaplikasikan ke permukaan tanah. Dalam proses pembangunan tersebut, pihak Organisasi Masyarakat Setempat Jorong Girimaju (OMS Jorong Girimaju) yang dikenal sebagai pengelola/pelaksana diduga melakukan beberapa pelanggaran seperti pengurangan volume item pekerjaan misalnya, tinggi papan kayu rabat beton seharusnya 20 cm, tetapi yang terjadi di lapangan diduga tidak sesuai dengan ukuran yang seharusnya tersebut, sedangkan bagian tengah jalan seharusnya ketebalannya 12 cm, tapi di lapangan hanya dibuat 10 cm, disamping itu juga tidak transparan

dalam melakukan pekerjaan tepatnya dalam penggunaan dana anggaran yang disediakan.

Berdasarkan wawancara pada tanggal 14 Mei 2014 Bapak Nasril selaku kepala bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pasaman Barat juga mengatakan bahwa masalah yang sering terjadi dalam pelaksanaan PPIP di lapangan adalah seperti masih banyaknya masyarakat yang tidak peduli dan tidak mendukung kegiatan pemberdayaan masyarakat, selain itu fasilitator yang tidak mempunyai pengalaman dan keahlian yang cukup untuk memfasilitasi masyarakat, dan kurangnya waktu pelatihan yang diberikan kepada OMS dan KPP (Kelompok Pemelihara dan Pemanfaat).

Selain itu Bapak Rudiyanto selaku Tim Penyelenggara PPIP di tingkat Kabupaten juga menjelaskan pada tanggal 10 Juni 2014 bahwa masalah yang terjadi dalam penyelenggaraan PPIP di tingkat desa atau dilapangan tersebut tidak sepenuhnya berasal dari Masyarakat atau Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) tetapi juga dari Tim Pelaksana Kabupaten (TPK) sebagai penyelenggara PPIP di tingkat kabupaten kurang mensosialisasikan pelaksanaan program kepada masyarakat dan OMS secara menyeluruh selain itu Tim Pelaksana Kabupaten juga kurang maksimal mengadakan monitoring dan evaluasi terhadap pekerjaan fasilitator dan masyarakat sejak dari awal sampai pada tahapan pelaksanaan kegiatan pembangunan dilapangan sehingga terjadi kesalahan teknis yang menyebabkan program tidak berjalan maksimal

Sementara itu berdasarkan pengamatan dan observasi yang penulis lakukan pada bulan November 2014 di jorong Simpang Ampek, jorong Langgam,

dan jorong Simpang Tigo terlihat bahwa kondisi jalan rabat beton yang telah selesai dibangun semenjak akhir Desember 2013 lalu sudah banyak yang mengalami kerusakan di bagian badan jalan yaitu sekitar 20-30%,

Penanggung jawab serta pengawasan program diserahkan pada Dinas PU Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, yakni bidang Cipta Karya. Untuk pengelolaan dana sebesar RP 250 juta tersebut, disalurkan secara bertahap kepada OMS yang dibentuk masyarakat lewat persetujuan walinagari setempat. Permasalahan PPIP yang terjadi di Jorong Girimaju, Nagari Koto Baru, Kecamatan Luhak Nan Duo tersebut hanya merupakan salah satu masalah yang terjadi dalam penyelenggaraan PPIP di Kabupaten Pasaman Barat.

Berdasarkan fenomena tersebut perlu dilakukan penelitian lanjutan yang berkaitan dengan **Evaluasi Program Pemberdayaan Masyarakat melalui Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PPIP) di Kabupaten Pasaman Barat.**

B. Identifikasi, Batasan dan Rumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Pihak Organisasi Masyarakat Setempat (OMS Jorong Girimaju) sebagai pengelola/pelaksana pembangunan jalan usaha tani diduga melakukan beberapa pelanggaran seperti pengurangan volume item pekerjaan serta tidak transparan dalam pekerjaan, misalnya tinggi papan kayu rabat beton

seharusnya 20 cm, tetapi yang dibuat di lapangan diduga tidak sesuai dengan ukuran yang seharusnya tersebut, sedangkan bagian tengah jalan, ketebalannya 12 cm, tapi di lapangan hanya dibuat 10 cm, disamping itu juga tidak transparan dalam melakukan pekerjaan tepatnya dalam penggunaan dana anggaran yang disediakan

- b. Masih banyaknya masyarakat yang tidak peduli dan tidak mendukung kegiatan pemberdayaan masyarakat, fasilitator yang tidak mempunyai pengalaman dan keahlian yang cukup untuk memfasilitasi masyarakat, dan kurangnya waktu pelatihan yang diberikan kepada Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) dan KPP (Kelompok Pemelihara dan Pemanfaat)
- c. Tim Pelaksana Kabupaten (TPK) sebagai penyelenggara PPIP di tingkat Kabupaten kurang mensosialisasikan pelaksanaan program kepada masyarakat atau OMS secara menyeluruh selain itu juga kurang maksimal mengadakan monitoring dan evaluasi terhadap pekerjaan fasilitator dan masyarakat sejak dari awal sampai pada tahapan pelaksanaan kegiatan pembangunan di lapangan sehingga terjadi kesalahan teknis yang menyebabkan program tidak berjalan maksimal

2. Pembatasan Masalah

Untuk memberikan arahan pada masalah yang diteliti sehingga tujuan dan manfaat tercapai dan tidak menyimpang maka perlu adanya pembatasan masalah.

Adapun batasan masalah dalam penelitian adalah pada:

- a. Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PPIP) melalui pembangunan infrastruktur jalan sebagai salah satu upaya pemberantasan kemiskinan di Kabupaten Pasaman Barat
- b. Dampak Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PPIP) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Pasaman Barat

3. Rumusan Masalah

- a. Bagaimanakah Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PPIP) melalui pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Pasaman Barat ?
- b. Bagaimanakah dampak pelaksanaan PPIP melalui pembangunan infrastruktur jalan terhadap kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Pasaman Barat?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk:

- a. Mendeskripsikan Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PPIP) melalui pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Pasaman Barat
- b. Mengetahui dampak pelaksanaan PPIP melalui pembangunan infrastruktur jalan terhadap kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Pasaman Barat

D. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian di atas, maka manfaat penelitian yang diharapkan adalah :

1. Secara Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk pengembangan konsep ilmu pengetahuan dan dapat digunakan untuk memperkuat kebenaran teori tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PPIP) di Kabupaten Pasaman Barat

2. Secara Praktis, hasil penelitian ini diharapkan:

- a. Memberikan masukan bagi Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat untuk ikut memfasilitasi terlaksananya evaluasi pemberdayaan masyarakat melalui Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PPIP) di Kabupaten Pasaman Barat
- b. Bagi Masyarakat Pasaman Barat untuk dapat meningkatkan partisipasi dalam Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PPIP) di Kabupaten Pasaman Barat
- c. Bagi Peneliti lanjutan sebagai dasar untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam yang berkaitan dengan Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PPIP)

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan program pembangunan infrastruktur pedesaan (PPIP) reguler I dan II yang berjumlah sebanyak 35 buah lokasi pada tahun 2013 di Kabupaten Pasaman Barat, secara umum semuanya sudah selesai terlaksana. Namun dalam pelaksanaan ini masih terdapat beberapa kendala, diantaranya; (1) jumlah lokasi pelaksanaan PPIP tidak seimbang dengan jumlah waktu pelaksanaan yang diberikan (2) waktu pemberian DIPA (Daftar Isian Proyek Anggaran) oleh APBN mengalami keterlambatan (3) jumlah personil yang ada di Dinas PU tidak seimbang dengan jumlah lokasi yang diturunkan dari APBN, (4) faktor cuaca yang kurang mendukung seperti curah hujan yang cukup tinggi. Dengan kondisi yang demikian mengakibatkan pelaksanaan di lapangan jadi terlambat.

Untuk hasil pembangunan infrastruktur, terutama yang berupa jalan beton di beberapa jorong sudah sesuai dengan tujuan yang diharapkan, namun di beberapa jorong lainnya masih terdapat kekurangan seperti ukuran panjang, lebar dan ketebalan jalan yang tidak sesuai dengan rencana yang ditetapkan serta di beberapa bagian jalan juga mengalami kerusakan seperti retak dan pecah setelah dimanfaatkan ± 1 tahun oleh masyarakat setempat.

- b. Dampak Pelaksanaan Program pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PPIP) berupa pembangunan jalan rabat beton pada tahun 2013 di Kabupaten Pasaman Barat sangat bermanfaat bagi masyarakat dan dapat memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berada di sekitar lokasi pembangunan jalan tersebut, misalnya dapat melancarkan kegiatan perekonomian, memberikan kemudahan akses transportasi bagi masyarakat untuk menuju lokasi perkebunan, perumahan, sarana kesehatan dan pendidikan, masjid, pasar, tempat pemakaman umum serta pengangkutan hasil pertanian.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan beberapa saran antara lain:

- a. Bagi pemerintah Kabupaten Pasaman Barat agar lebih meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan program pembangunan infrastruktur pedesaan (PPIP) supaya program ini bisa terselenggara sesuai dengan rencana dan tujuan yang diharapkan serta berkelanjutan sebagai upaya untuk memberdayaan masyarakat.
- b. Bagi tim penyelenggara dan pihak terkait lainnya agar mempertimbangkan dan mempersiapkan waktu pelaksanaan kegiatan dengan sebaik mungkin, untuk kegiatan selanjutnya diharapkan kepada pemerintah maupun tim pelaksana agar lebih meningkatkan sosialisasi program atau kegiatan kepada masyarakat agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan program tersebut nantinya, selain itu juga Tim Pelaksana harus

mengadakan bimbingan dan pembinaan secara operasional dan teknis serta pemantauan dan pengawasan secara berkala selama kegiatan pelaksanaan pembangunan berlangsung agar hasil pembangunannya sesuai dengan rencana dan tujuan yang diharapkan.

- c. Bagi masyarakat Pasaman Barat agar lebih meningkatkan rasa kepedulian terhadap kegiatan pemberdayaan masyarakat, lebih berpartisipasi lagi dalam pelaksanaan program yang diberikan oleh pemerintah serta kepedulian untuk memelihara dengan baik hasil pembangunan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus, Suryono. 2006. *Ekonomi Politik Pembangunan Dalam Perspektif Teori Ilmu Sosial*. Malang : Universitas Negeri Malang (Um Press).
- Alfitri. 2011. *Community Development : Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Aprillia, Theresia dkk. 2014. *Pembangunan Berbasis Masyarakat: Acuan Bagi Praktisi, Akademisi, dan Pemerhati Pengembangan Masyarakat*. Bandung : Alfabeta.
- Chabib, Soleh. 2014. *Dialektika Pembangunan dengan Pemberdayaan*. Bandung : Fokusmedia.
- Husein, Umar. 2005. *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Isbandi, Rukminto Adi. 2012. *Intervensi Komunitas & Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Mohammad, Ali. 2014. *Memahami Riset Perilaku dan Sosial*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Moleong, Lexi J. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Pahmi, SY. 2010. *Perspektif Baru Antropologi Pedesaan*. Jakarta : Gaung Persda Press.
- Rahardjo, Adisasmita. 2011. *Manajemen Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Riduwan. 2012. *Sakala Pengukuran Variabel-variabel Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Sjafrizal. 2014. *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Soetomo. 2012. *Keswadayaan Masyarakat: Manifestasi Kapasitas Masyarakat untuk Berkembang secara Mandiri*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.